

# DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN DARI FIVE POWER DEFENCE ARRANGEMENT (FPDA) (INDONESIA'S DEFENSE DIPLOMACY IN FACING THREATS FROM THE FIVE POWER DEFENSE ARRANGEMENT (FPDA))

Gistyger Hasudungan Manullang<sup>1</sup>, Muhamad Fauzi Abdul Rachman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Hubungan Internasional, <sup>2</sup>Universitas Pertamina

gistygermanullang@gmail.com

mfarachman@universitaspertamina.ac.id

**ABSTRAK:** Five Powers Defence Arrangement (FPDA) merupakan aliansi pertahanan yang dilakukan oleh lima negara (Inggris, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia). Pembentukan FPDA untuk membantu negara persemakmuran Inggris yaitu Malaysia dan Singapura karena kedua negara ini menganggap Indonesia sebagai ancaman. Sebaliknya, Indonesia juga menganggap FPDA sebagai sebuah ancaman karena negara tiga negara anggota FPDA berbatasan langsung dengan Indonesia dan FPDA memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu untuk menghadapi ancaman yang mungkin datang dari FPDA, salah satunya dengan melakukan diplomasi pertahanan. Penelitian ini akan membahas bagaimana Indonesia dapat menghadapi ancaman dari FPDA. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Selain itu, teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah *internet based research*. Data-data yang diperoleh akan dikelola sesuai dengan topik penelitian. Dalam hal ini, terdapat dua upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk bisa mengimbangi kekuatan FPDA, yaitu meningkatkan diplomasi pertahanan dengan negara anggota FPDA dan membangun kemitraan strategis dengan negara *great power* (Amerika Serikat, Rusia, dan Cina).

**Kata Kunci:** Indonesia, Diplomasi Pertahanan, FPDA

**Abstract:** *The Five Powers Defense Arrangement (FPDA) is a defense alliance carried out by five countries (UK, Australia, New Zealand, Singapore, and Malaysia). FPDA to help the British Commonwealth countries, namely Malaysia and Singapore because Malaysia and Singapore consider Indonesia a threat that is difficult to deal with. On the other hand, Indonesia considers the FPDA as a threat because the three FPDA member countries are directly related to Indonesia and the FPDA has much greater power than Indonesia. Therefore, Indonesia must be able to face the threats that will come from the FPDA, either by conducting defense diplomacy or partnership strategies. This study will discuss how Indonesia can face threats from FPDA. The purpose of this study is to find out how Indonesia's defense diplomacy can face threats from the FPDA. In this study, the research method used is a qualitative research method. In addition, the technique of data collection used is internet-based research. The data obtained will be managed according to the research topic. In this case, there are two efforts that can be made by Indonesia to realize the strength of the FPDA, namely increasing defense diplomacy with FPDA member countries and building partnership strategies with big countries (the United States, Russia, and China).*

**Keywords:** Indonesia, Defence Diplomacy, FPDA

## PENDAHULUAN

*Five Power Defence Arrangements* (FPDA) merupakan sebuah aliansi pertahanan yang dibentuk oleh Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura pada tahun 1971. Adapun pembentukan FPDA itu sendiri merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Inggris terhadap negara persemakmurnya yaitu Malaysia dan Singapura. Malaysia dan Singapura merupakan negara yang baru merdeka, sehingga kekuatan kedua negara tersebut dalam mempertahankan wilayahnya masih kesulitan. Terlebih lagi, di masa itu, Indonesia dianggap sebagai ancaman bagi Malaysia dan Singapura karena Indonesia memiliki kekuatan militer yang lebih kuat dari Malaysia dan Singapura. Hal ini membuat Inggris melakukan penarikan pasukannya yang berada di Timur Zues untuk melakukan pembentukan FPDA (Sari, 2019). FPDA memiliki tiga pilar utama, yaitu: pertama, *Integrated Air Defense System* (IADS) yang bertanggung jawab untuk mempertahankan sistem pertahanan udara Malaysia dan Singapura. *Kedua*, sebagai tempat yang dapat dipercaya bagi negara-negara anggota yang ingin berkonsultasi terkait *military-political*. Negara-negara anggota membentuk *Joint Consultative Council* (JCC) sebagai forum konsultasi. Ketiga, melakukan latihan bersama melalui *Exercise Scheduling Conference* (ESC), yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan FPDA (Sari, 2019).

Pembentukan FPDA menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan bagi Indonesia karena pembentukan FPDA itu bisa menjadi ancaman bagi

Indonesia. Dilihat secara geografis tiga dari negara anggota FPDA yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Sedangkan Inggris dan Selandia Baru berada jauh dari wilayah Indonesia. Hal ini membuat Indonesia perlu untuk memperhatikan keamanan negaranya. Dengan meningkatkan sistem keamanannya sehingga Indonesia bisa mempertahankan kedaulatan negaranya dan dapat mengurangi ancaman dari FPDA. Indonesia perlu untuk menjaga hubungannya dengan negara anggota FPDA, khususnya dengan tiga negara anggota yang berbatasan langsung dengan Indonesia (Hanggu *et al*, 2018).

Indonesia bisa dianggap sebagai ancaman bagi Malaysia dan Singapura karena, salah satunya, Indonesia memiliki hubungan yang dekat dengan Uni Soviet. Indonesia melakukan kerja sama pertahanan dengan melakukan impor senjata militer yang canggih dari Uni Soviet guna untuk memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Hal ini membuat Indonesia memiliki sistem pertahanan yang kuat di Asia Tenggara. Peningkatan hubungan dengan Uni Soviet ini dilakukan di masa Presiden Soeharto (Montratama, 2015).

Sejalan dengan persepsi Indonesia terhadap FPDA sebagai suatu ancaman, Indonesia dengan negara anggota FPDA mengalami beberapa kali permasalahan. Pertama, kasus antara Indonesia dengan Australia. Begitu banyak pelanggaran yang dilakukan Australia terhadap Indonesia, seperti kasus penyadapan kepada kepala negara dan ibu negara (Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono), pelanggaran kapal perang AL Australia di wilayah perairan

Indonesia, dan pemberian kapal gratis kepada pengungsi untuk kembali ke perairan Indonesia “*Turn Back The Boat*”. Kedua, permasalahan *Flight Information Region* (FIR) antara Indonesia dengan Singapura. Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat pada tahun 1995 dalam pengaturan lalu lintas udara di atas Pulau Batam, Tanjung Pinang, dan Natuna berada di bawah kendali Singapura (*Air Traffic Control / ATC*). Permasalahan ini muncul karena Singapura tidak mengizinkan Indonesia melakukan penerbangan yang melewati wilayahnya sendiri hingga sekarang. Ketiga, Singapura memiliki peranan yang penting dalam penyadapan intelijen yang dilakukan oleh Five Eye (Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru). Penggunaan kabel bawah laut SEA-ME-WE-3 yang dilakukan oleh Singapura dengan Australia. Kabel tersebut berguna untuk saling berbagi Informasi. Namun, hal ini membuat Indonesia menjadi sasaran utama pada kegiatan tersebut. Keempat, hubungan Indonesia dengan Malaysia yang mengalami kemerosotan. Kemerosotan ini diakibatkan dengan adanya implementasi kebijakan pemberantasan *illegal fishing* (Hanggu *etal*, 2018).

FPDA merupakan sebuah aliansi pertahanan yang dibentuk oleh Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura. Adapun pembentukan FPDA itu sendiri sebagai bentuk respons terhadap Indonesia yang dianggap sebagai ancaman bagi Malaysia dan Singapura. Sebagai negara yang belum memiliki kekuatan militer yang kuat, Inggris bertanggung jawab untuk melindungi negara persemakmurnya. Akan tetapi pembentukan FPDA itu sendiri menjadi suatu

ancaman bagi Indonesia. Hal ini bisa terlihat dari tiga negara anggota FPDA berbatasan langsung dengan Indonesia. Indonesia perlu merespon hal tersebut untuk bisa mempertahankan kedaulatannya. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman yang akan datang dari FPDA?

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman yang akan datang dari FPDA. Dengan begitu, Indonesia mampu untuk mengurangi ancaman tersebut dan bisa mempertahankan kedaulatan negaranya.

## METODE

Ancaman merupakan suatu hal yang dapat mengganggu kestabilan sebuah negara. Ancaman bisa datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Oleh sebab itu, negara harus meningkatkan kekuatan yang dimiliki agar dapat menghadapi ancaman tersebut. Peningkatan kekuatan tersebut dapat berupa peningkatan kekuatan militer atau nonmiliter. Hal ini dilakukan agar sebuah negara dapat mempertahankan kestabilan negaranya. Sebelum melakukan peningkatan kekuatan, negara perlu untuk mengetahui ancamannya terlebih dahulu sehingga bisa menentukan strategi apa yang akan digunakan dalam menghadapi ancaman tersebut. Menurut Walt (1987), terdapat empat hal yang dapat digunakan oleh suatu negara untuk menentukan siapa ancaman yang akan dihadapi: Pertama, *aggregate power*. Kekuatan agregat yang dimiliki oleh

suatu negara dapat dilihat dari adanya peningkatan kemampuan ekonomi dan kemampuan militer suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat mendorong peningkatan kekuatan militernya. Kedua, *geographic proximity*. Kedekatan geografis bisa memungkinkan negara lain menjadi ancaman karena mereka akan lebih mudah untuk melakukan serangan secara langsung. Ketiga, *offensive power*. Kemampuan ofensif suatu negara dapat dilihat dari kekuatan militer yang dimilikinya. Ketika negara tersebut melakukan peningkatan kekuatan militer negaranya secara terus menerus maka hal itu bisa membuatnya akan lebih mudah untuk melakukan tindakan ofensif terlebih dahulu. Keempat, *aggressive intentions*. Negara yang memiliki niat ofensif yang tinggi akan memungkinkan negara tersebut untuk melakukan serangan ke negara yang menjadi targetnya.

Dalam hal ini, Indonesia perlu untuk memperhatikan kedaulatannya terlebih lagi dengan negara-negara anggota FPDA yang berada di dekat wilayah Indonesia. Berdasarkan pemahaman ancaman oleh Walt, negara anggota FPDA yang memiliki kedekatan geografis dengan Indonesia perlu untuk diperhatikan. Terlebih lagi kekuatan militer negara anggota FPDA lebih kuat dari Indonesia sehingga memungkinkan bagi negara anggota FPDA untuk melakukan serangan terhadap wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan diplomasi pertahanan terhadap negara anggota FPDA.

Diplomasi pertahanan merupakan suatu kerja

sama pertahanan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dengan menggunakan instrumen militer. Kerja sama yang dapat dilakukan oleh negara tersebut seperti melakukan pembentukan aliansi, latihan bersama, jual beli senjata militer dan sebagainya. Dalam konteks diplomasi pertahanan Indonesia, Indonesia memiliki 3 (tiga) fungsi dalam melakukan diplomasi pertahanan, yaitu: (1) Diplomasi pertahanan Confidence Building Measure (CBM) yang berupa kegiatan kunjungan negara, kerja sama strategis, melakukan latihan bersama dan lain-lain. (2) Diplomasi pertahanan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sistem pertahanan suatu negara. (3) Diplomasi pertahanan untuk meningkatkan perkembangan industri militer di dalam negara (Laksmiana, 2012).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendalami suatu fenomena tertentu. Fenomena yang dimaksud adalah di era globalisasi saat ini, begitu banyak yang mengalami perubahan dengan cepat pada hal-hal tertentu seperti pada konsep keamanan yang memerlukan persenjataan militer yang canggih. Oleh karena itu, negara harus bisa menjaga eksistensinya di dalam sistem internasional dan mencapai kepentingan nasional. Selain itu, suatu ancaman tetap masih ada dan pembentukan aliansi masih sangat berguna. Aliansi merupakan pilihan yang penting bagi suatu negara untuk menghadapi ancaman yang tidak mampu diselesaikan dengan kekuatan internal dari sebuah negara. Banyak negara yang memiliki kekuatan internalnya masih lemah

untuk menghadapi berbagai ancaman yang datang terutama bagi negara berkembang. Oleh sebab itu, negara harus bisa mempertahankan kedaulatannya dan meningkatkan kekuatan yang dimilikinya (Montratama, 2015).

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu *internet based research*. Pada pencarian data, penulis menggunakan beberapa kata kunci yang berhubungan dengan topik penelitiannya seperti diplomasi Pertahanan Indonesia, Five Power Defence Arrangement (FPDA), kerja sama pertahanan Indonesia dengan negara anggota FPDA, dan Kerja sama Indonesia dengan negara *great power*. Data-data yang diperoleh dapat berupa buku atau artikel jurnal. Kemudian penulis akan memilih dan mengambil data-data yang sesuai dengan topik penelitian yaitu Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman yang Akan Datang dari FPDA.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Diplomasi Pertahanan Indonesia dengan Negara Anggota FPDA

*Global Fire Power* (GFP) merilis *military strength ranking* pada tahun 2022. Pada rilisan tersebut, Indonesia berada di peringkat 15 dengan anggaran pertahanan sebanyak USD 9 miliar, Inggris peringkat 8 dengan anggaran pertahanan sebanyak USD 68 miliar, Australia peringkat 17 dengan anggaran pertahanan sebanyak USD 44 miliar, Singapura peringkat 42 dengan anggaran pertahanan sebanyak USD 11 miliar, Malaysia peringkat 48 dengan anggaran pertahanan sebanyak USD 3,7

miliar, dan Selandia Baru peringkat 84 dengan anggaran pertahanan sebanyak USD 3,7 miliar. Jika dilihat berdasarkan peringkat GFP Indonesia hanya kalah dengan Inggris, tetapi jika kelima negara menggabungkan kekuatannya maka akan terjadi perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Oleh karena itu, FPDA bisa menjadi ancaman yang besar bagi Indonesia.

Menurut Walt (1997) ada tiga alasan yang menyebabkan aliansi dapat melemah, yaitu .

#### 1. Perubahan persepsi terhadap ancaman:

Sebuah aliansi dibentuk karena untuk merespon sebuah ancaman yang telah di persepsikan bersama dalam aliansi. Ketika suatu saat ancaman tersebut berubah dari persepsi setiap negara aliansi maka keberadaan aliansi menjadi kurang relevan. Tidak adanya alasan dalam pembentukan aliansi jika tidak ada lagi musuh bersama yang dihadapi. Dengan begitu, aliansi tersebut dapat bubar atau melakukan pembentukan aliansi baru bagi negara-negara yang memiliki musuh bersama.

#### 2. Menurunnya kredibilitas sebuah aliansi

Salah satu fungsi dari dibentuknya sebuah aliansi untuk menjadi *psychological deterrent* bagi musuh yang dihadapi. Namun permasalahannya, jika sebuah aliansi tidak dapat memberikan tekanan atau ancaman kepada musuh yang dihadapi maka keberadaan aliansi tersebut menjadi tidak relevan terhadap musuh yang dihadapi. Selain itu bisa juga disebabkan ketika ada negara anggota yang sedang terlibat konflik dengan musuh bersama yang telah ditetapkan, namun negara-negara anggota aliansi lainnya tidak

melakukan apa-apa dalam konflik tersebut, maka kredibilitas dari sebuah aliansi tersebut akan runtuh.

### 3. Perubahan politik domestik negara anggota aliansi

Sebuah negara akan dipengaruhi oleh elit birokrasi yang dimiliki. Ketika terjadi perubahan rezim di salah satu atau lebih negara anggota aliansi dan rezim tersebut memiliki pandangan yang berbeda atas ancaman bersama yang telah ditetapkan sebelumnya, maka eksistensi dari aliansi tersebut tidak relevan. Rezim tersebut bisa membuat berbagai kebijakan yang sesuai dengan rezim itu sendiri.

Untuk menunggu melemahnya FPDA akan membutuhkan waktu yang lama. Dalam hal ini untuk bisa mengurangi ancaman dari FPDA, Indonesia bisa melakukan diplomasi pertahanan dengan negara anggota FPDA. Indonesia telah menjalin kerja sama pertahanan dengan negara anggota FPDA. Akan tetapi, Indonesia lebih sering melakukan kerja sama dengan Malaysia, Singapura, dan Australia. Kerja sama pertahanan ini sering dilakukan karena ketiga negara ini lebih dekat dengan wilayah Indonesia dilihat secara geografis. Sedangkan kerja sama pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Inggris dan Selandia Baru tidak begitu banyak. Indonesia tetap perlu melakukan kerja sama dengan Inggris dan Selandia Baru.

Diplomasi pertahanan Indonesia dengan Malaysia. Indonesia telah menjalin kerja sama di bidang pertahanan dengan Malaysia sudah sejak lama. Kerja sama tersebut ditandai dengan adanya kesepakatan perjanjian keamanan yaitu *security*

*agreement* 1972. Perjanjian keamanan ini disepakati pada 6 April 1972 di Kuala Lumpur, Malaysia. Hal ini membuat Indonesia dan Malaysia sepakat untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan wilayahnya khususnya di wilayah perbatasan melalui General Border committee Malaysia – Indonesia (GBC Malindo). GBC Malindo menjadi suatu wadah bagi Indonesia dan Malaysia dalam membuat suatu kebijakan untuk melindungi wilayah perbatasan kedua negara (Elfitriani et al, 2018).

Salah satu wilayah yang menjadi fokus antara Indonesia dan Malaysia dalam kerja sama pertahanan di wilayah Selat Malaka. Indonesia dan Malaysia membuat sebuah patroli bersama di antara kedua negara yaitu Optima Malindo. Patroli ini melibatkan angkatan laut Indonesia dan angkatan laut Malaysia untuk menjaga keamanan Selat Malaka. Patroli bersama ini memberikan keuntungan bagi Indonesia dan Malaysia dalam menjaga keamanan Selat Malaka. Selain itu juga, Indonesia dan Malaysia melakukan latihan militer bersama yang disebut sebagai Malindo Jaya. Latihan bersama ini berguna untuk meningkatkan kualitas personel militer dalam hal pertempuran dan meningkatkan profesional angkatan laut Indonesia dan Malaysia (Suproboninbrum & Kurniawan, 2017).

Diplomasi pertahanan Indonesia dengan Singapura. Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura telah berlangsung sejak lama. Kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura sudah dimulai sejak tahun 1970 yang kemudian kerja sama tersebut diperbaharui pada 21 April 1995 dalam bentuk perjanjian *Military Training Area*

(MTA). Dalam perjanjian MTA telah disepakati bahwa angkatan bersenjata Singapura dapat melakukan latihan militer di Area 1 (Tanjung Pinang) dan Area 2 (Laut Cina Selatan). Pada Area 1, Pemerintah Indonesia mengizinkan angkatan udara Singapura dalam melakukan latihan maupun tes kelayakan terbang. Latihan ini dibatasi dengan penerbangan secara bersamaan maksimal 15 pesawat dan tidak boleh melebihi 40 kali penerbangan dalam satu hari. Pada area 2, pemerintah Indonesia mengizinkan angkatan udara dan angkatan laut Singapura untuk melaksanakan latihan militer. Di Area 2, pemerintah Indonesia membatasi angkatan udara Singapura untuk melakukan penerbangan maksimal 20 pesawat secara bersamaan dan tidak boleh melebihi 60 kali penerbangan dalam satu hari (Parulian et al, 2019).

Selain itu, Indonesia dan Singapura melakukan latihan militer bersama untuk menjaga keamanan laut. Salah satu latihan bersama yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura adalah *Sea Eagle Joint Exercise*. Latihan ini melibatkan angkatan laut Singapura dan angkatan laut Indonesia yang telah berlangsung sejak tahun 1974. Melalui latihan bersama ini dapat meningkatkan persahabatan antara kedua negara dalam menjaga keamanan lautnya. Dalam latihan bersama ini, dapat memudahkan kedua negara untuk menghadapi ancaman yang mengganggu perairan kedua negara ini. Latihan ini terakhir dilakukan pada tahun 2016 dengan melibatkan angkatan laut Indonesia dan Singapura. Kegiatan ini membuktikan bahwa kerja sama yang dilakukan saling menguntungkan bagi

kedua negara (Suproboninbrum & Kurniawan, 2017).

Diplomasi pertahanan Indonesia dengan Australia. Dapat dikatakan hubungan Indonesia dan Australia mengalami naik turun. Di masa Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Paul Keating melakukan penandatanganan sebuah perjanjian kerja sama pertahanan yaitu *Agreement on Maintaining Security (AMS)* pada 18 Desember 1995. Akan tetapi hubungan Indonesia dengan Australia kurang baik karena terjadinya referendum terhadap Timor-Timur. Indonesia menganggap Australia ikut terlibat dalam mendukung referendum yang dilakukan Timor-Timur pada tahun 1999. Selain dari itu, Indonesia dan Australia juga membentuk suatu ajang perlombaan tembak yang diselenggarakan oleh angkatan darat Australia yaitu *Australian Army Skills at Arms Meeting (AASAM)*. Kegiatan ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1984. Indonesia ikut terlibat dalam lomba tembak yang diselenggarakan AASAM pada tahun 1991. Keterlibatan Indonesia pada lomba tembak tersebut untuk menunjukkan bahwa angkatan bersenjata Indonesia mampu bersaing dengan angkatan bersenjata negara lainnya. Dengan adanya AASAM, Indonesia dapat melakukan diplomasi pertahanan dengan Australia sehingga hubungan kedua negara akan semakin dekat. Kerja sama ini dapat membantu meningkatkan sistem pertahanan suatu negara dan rasa saling percaya diantara kedua negara (Azhar et al, 2017).

Selain itu, Indonesia dan Australia bekerja sama dalam menangani teroris. Kedua negara ini sepakat untuk menghadapi teroris karena teroris merupakan suatu ancaman yang dapat mengganggu

kedaulatan negara. Indonesia dan Australia sepakat untuk mengirim angkatan bersenjata dalam melakukan kerja sama menghadapi para kelompok teroris. Dalam menanggulangi serangan teroris, Indonesia dan Australia perlu memahami terkait pola teroris dan penggunaan teknologi dan informasi yang digunakan oleh teroris. Adanya kerja sama ini dapat meningkatkan rasa saling percaya di kedua negara dan dapat menjaga kedaulatan negara (Azhari, 2018).

Diplomasi pertahanan Indonesia dengan Inggris. Indonesia dan Inggris tetap menjalin kerja sama pertahanan. Akan tetapi, kerja sama yang dilakukan diantara kedua negara ini tidaklah begitu banyak daripada tiga negara anggota FPDA yang berbatasan dengan Indonesia. Secara geografis, Inggris berada sangat jauh dari wilayah Indonesia. Meskipun begitu, kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan Inggris begitu penting untuk menjaga hubungan baik antar negara. Salah satu kerja sama yang dilakukan adalah Indonesia dan Inggris melakukan pertemuan dalam rangka pelaksanaan *Joint Defence Cooperation Dialogue* (JDCD) pada tahun 2019. Pertemuan ini menjadi implementasi dari Nota Kesepahaman Kerja sama Bidang Pertahanan yang telah disepakati oleh Indonesia dan Inggris pada tahun 2012. JDCD menjadi sebuah wadah untuk menjalin kerja sama pertahanan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Pertemuan tersebut akan membahas terkait isu pertahanan, evaluasi, dan rencana kerja sama pertahanan di masa depan (Kemlu, 2019).

Diplomasi pertahanan Indonesia dengan

Selandia Baru. Sama halnya dengan Inggris, kerja sama pertahanan Indonesia dengan Selandia Baru tidaklah begitu banyak dibandingkan tiga negara anggota FPDA yang berbatasan dengan Indonesia. Meskipun begitu, Selandia Baru juga penting bagi Indonesia sehingga Indonesia perlu untuk menjaga hubungannya dengan Selandia Baru. Pada tahun 2017, Menteri Pertahanan Republik Indonesia yaitu Ryamizard Ryacudu menyambut kunjungan Menteri Pertahanan Selandia Baru yaitu Mark Mitchell di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Dalam pertemuan ini, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan. Kerja sama ini dilakukan untuk memperkuat keamanan di kawasan dan menghadapi suatu ancaman khususnya ancaman terorisme. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti peningkatan kerja sama di bidang pendidikan, latihan bersama, pertukaran informasi, dan kunjungan antar pejabat pertahanan (Kemhan, 2017).

## 2. Membangun *strategic partnership*

Indonesia memiliki doktrin politik yang selalu menjadi pedoman dalam membuat kebijakan luar negeri yang disebut dengan politik bebas aktif. Bebas berarti Indonesia memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakannya dan terlepas dari blok-blok kekuatan dunia. Aktif berarti Indonesia ikut dalam berkontribusi dalam permasalahan internasional yang terjadi. Politik bebas aktif Indonesia merupakan sebuah alat yang digunakan Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional, terutama dalam aspek ekonomi yang akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat

Indonesia, aspek militer yang berdampak pada penguatan kapabilitas pertahanan negara, dan aspek kedaulatan untuk menjaga kestabilan Indonesia dari ancaman yang akan datang baik dari domestik atau internasional.

*Strategic partnership* sangat penting bagi Indonesia untuk memperkuat kemampuan Indonesia untuk mengimbangi kekuatan FPDA. Indonesia dapat melakukan hubungan kemitraan strategis dengan tiap negara, secara khusus dengan negara *super power* seperti Amerika Serikat dan negara kompetisinya Rusia dan Cina. Ketiga negara tersebut dapat dikatakan negara yang sangat berpengaruh di masa sekarang.

Amerika Serikat merupakan kemitraan strategis yang efektif bagi Indonesia untuk mengimbangi kekuatan FPDA. Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki hubungan dekat dengan negara anggota FPDA. Namun kemitraan strategis Indonesia dengan Amerika Serikat kurang memiliki arti bagi Indonesia. Karena, itu tidak mampu untuk menangkal Malaysia dalam melakukan pelanggaran. Jumlah pelanggaran yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia terus bertambah mulai dari 2010 hingga saat ini. Perlu kajian yang lebih lanjut terkait kemitraan strategis Indonesia. Indonesia melakukan kemitraan strategis dengan AS bukan Indonesia menutup diri dengan negara yang menjadi kompetisi AS, seperti Rusia dan Cina (Montratama, 2015).

Indonesia melakukan kemitraan strategis dengan Rusia dan Cina. Kemitraan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam

meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia dalam menghadapi FPDA. Walaupun kemampuan kedua negara ini masih berada di bawah Amerika Serikat, setidaknya kedua negara ini dapat meningkatkan kemampuan Indonesia (Montratama, 2015). Namun sebelum melakukan kemitraan dengan Rusia dan Cina, Indonesia harus bisa mempertimbangkan segala keputusan yang dibuat, terutama untuk dimasa yang akan datang.

## SIMPULAN

Ada dua upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk bisa mengimbangi kekuatan FPDA, yaitu meningkatkan diplomasi pertahanan dengan negara anggota FPDA dan membangun kemitraan strategis dengan negara *great power* (Amerika Serikat, Rusia, dan Cina). Meningkatkan diplomasi pertahanan dengan negara anggota FPDA dapat meningkatkan rasa kepercayaan tiap negara. Kegiatan yang dapat dilakukan Indonesia dengan negara anggota seperti pertukaran militer, latihan bersama, atau melakukan kunjungan bersama. Sedangkan membangun kemitraan strategis berfungsi untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki Indonesia untuk bisa mengimbangi kekuatan FPDA. Kemitraan strategis ini dapat dilakukan dengan negara *super power*, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, F., et al. (2017) Diplomasi Pertahanan Indonesia Melalui Lomba Tembak Di Australian Army Skill At Arms Meeting (AASAM). *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*, 3 (2), 49-73

- Azhari. (2018). Diplomasi Pertahanan Bidang Kontra Terorisme Dalam Kerja sama Pertahanan Antara Indonesia dan Australia Tahun 2004-2018. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, 4 (2), 93-107
- El Fitriani, et al. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 4 (3), 73-96
- GFP. (2022). 2022 Military Strength Ranking. *Global Fire Power*, retrieved from: <https://www.globalfirepower.com/count-ries-listing.php>
- Hadiwinata, B. S. Studi Dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, Dan Reflektivis. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Hanggu, et al. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia Kepada Negara Anggota Five Power Defence Arrangements (Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, Inggris) Tahun 2000 – 2017, *Jurnal ProdiDiplomasi Pertahanan*, 4 (1), 39 – 56
- Kemhan. (2017). Antisipasi Berkembangnya ISIS, Indonesia-New Zealand Sepakat Pentingnya Memperkuat Kerja Sama Kawasan. *Kemhan*, retrieved from: <https://www.kemhan.go.id/2017/05/31/antisipasi-berkembangnya-isis-indonesia-new-zealand-sepakat-pentingnya-memperkuat-kerja-sama-kawasan.html>
- Kemlu. (2019). Indonesia-Inggris Sepakat Tingkatkan Kerja sama Pertahanan Melalui Dialog Strategis. *Kemlu*, retrieved from: <https://kemlu.go.id/london/id/news/2686/indonesia-inggris-sepakat-tingkatkan-kerjasama-pertahanan-melalui-dialog-strategis>
- Laksmiana, E. (2012). Regional Order by Other Means? Examining the Rise of Defense Diplomacy in Southeast Asia. *Asian Security*, 8 (3), 251–270
- Montratama, I. (2015). Strategic Re-Alignment: Alternatif Indonesia Dalam Mengimbangi Ancaman Aliansi Five Power Defence Arrangement (FPDA), *Jurnal Pertahanan*, 5 (1), 129-153
- Nugraha, M. H. R. (2017). Indonesian Future Strategic Defense Planning, *Jurnal Pertahanan*, 3 (3), 207-220
- Parulian, Y., et al. (2019). Analisis Confidence Building Measures (CBMs) Terhadap Kerja sama Bilateral Pertahanan Antara Indonesia dengan Singapura. *Jurnal Keamanan Maritim*, 5 (2), 87-101
- Rahmat, A. N. (2013). Five Power Defence Arrangements Dalam Pandangan Konstruktivisme, *Jurnal Interdependence*, 1 (1), 1-20
- Sari, D. L. (2019). Five Power DEFENCE Arrangements (FPDA) and The Role of Strategic Engagement In The Southeast Asian Region, *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 2 (2), 55-71
- Sudarsono, Budyanto., dkk. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mencapai Kepentingan Nasional. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 8 (3), 83-102
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suproboningrum, L., & Kurniawan, Y. (2017).



Diplomasi Maritim Dalam Keberhasilan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia-Singapura di Selat Malaka. *Politica*, 8 (2), 163-187

Walt, Stephen M. (1987). *The Origins Of Alliances*. New York: Cornell University Press.

Walt, Stephen M. (1997). Why Alliances Endure or Collapse. *Survival*, 39 (1), 156-179